

EDUKASI KESADARAN MASYARAKAT MENJAGA DAN MELESTARIKAN HUTAN HUJAN TROPIS PADA MASYARAKAT KOTA BONTANG

Hairunnisa¹⁾, Mohammad Noor²⁾, Sabiruddin³⁾, Kheyene Molekandela Broer⁴⁾

^{1,2,3,4)}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman
Alamat Email : fokda_2006@yahoo.com

ABSTRACT

Tropical rainforest is Indonesia's natural potential to be saved. The condition of forests in Indonesia, especially in the town of Bontang, East Kalimantan is of concern. The amount of forest destruction caused by human behavior such as forest fires, illegal logging which will impact on environmental damage and can disrupt human activities. This is a threat to the existence of rain forest rainforest such as loss of function of forest itself. The purpose of this study is to find out what kind of education programs provided by the government to the surrounding community in maintaining the rainforest. Bontang city government focus on providing understanding to the public about the importance of maintaining the existence of tropical rain forests in the city of Bontang. This research uses qualitative approach with interview method and focus group discussion (FGD). Government efforts in pursuing activities to educate many experienced obstacles. Counseling is more focused on how to bring benefits to the community in managing the forest but still maintain the forest resources. Such as rubber planting because rubber can increase people's income. this activity is expected to be effective in involving the community to help the government maintain the tropical rain forest in Bontang city.

Keywords: *Tropical Rain Forest, Education, Society.*

ABSTRAK

Hutan hujan tropis adalah potensi alam Indonesia yang harus diselamatkan. Kondisi hutan di Indonesia terutama di kota Bontang Kalimantan Timur memprihatinkan. Banyaknya kerusakan hutan dikarenakan perilaku manusia seperti kebakaran hutan, penebangan pohon (*illegal logging*) yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan dapat mengganggu aktivitas manusia. Hal ini yang mengancam eksistensi keberadaan hutan hujan tropis seperti hilangnya fungsi hutan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa program edukasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sekitar dalam menjaga hutan hujan tropis. Pemerintah kota Bontang fokus dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga eksistensi hutan hujan tropis di kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan *focus group discussion* (FGD). Upaya pemerintah dalam mengupayakan kegiatan-kegiatan untuk meng-edukasi banyak mengalami kendala-kendala. Penyuluhan lebih focus kepada bagaimana mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dalam mengelola hutan tetapi tetap menjaga sumber daya hutan tersebut. Seperti menanam karet karena karet dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. kegiatan ini diharapkan dapat efektif dalam melibatkan masyarakat untuk membantu pemerintah menjaga hutan hujan tropis di kota Bontang

Kata Kunci: *Hutan Hujan Tropis, Edukasi, Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi alam yang kaya. Sumber daya alam yang melimpah tersebut salah satunya keanekaragaman hayati yakni

hutan hujan tropis. Menurut UU RI No 41 Tahun 1999 hutan merupakan sumber daya alam berupa suatu ekosistem. Hutan hujan tropis adalah hutan yang selalu basah atau lembab yang ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, kurang lebih pada lintang 0°–10° ke utara dan selatan khatulistiwa. Hutan

Kalimantan sebagai paru-paru dunia tentunya menjadi kebanggaan sendiri bagi Indonesia, karena beragam ekosistem didalamnya pasti juga beranekaragam.

Indonesia adalah salah satu kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia. Menurut Vickery (1984) yang digunakan kembali oleh Indriyanto (2006). Hutan hujan tropis adalah vegetasi hutan tertua yang telah menutupi banyak lahan yang terletak pada 10° LU dan 10° LS dan terbentuk oleh vegetasi klimaks pada daerah curah hujan 2.000-4.000 mm pertahun, rata-rata temperatur 25°C dengan perbedaan temperatur yang kecil sepanjang tahun dan rata-rata kelembaban udara 80%.

Posisi geografis hutan tropis meliputi wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia bagian utara, Amerika Tengah dan sebagian besar di Amerika Selatan. Hutan tropis merupakan hutan yang berada di daerah tropis.

Hutan memiliki beragam fungsi bagi masyarakat sekitar. Menurut Soetrisno (1995) bagi masyarakat penduduk tepian hutan, hutan memiliki fungsi sebagai tempat penyangga seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka. Kepentingan masyarakat sekitar banyak bergantung pada hutan seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sumber energi yakni kayu bakar. Soetrisno (1995) mengatakan mereka dengan ketat menjaga kelestarian hutan tersebut melalui berbagai peraturan yang kita kenal dengan hak *ulayat*.

Hukum adat dengan sendirinya berlaku tetapi terkadang pergerakannya terbatas

bahkan hilang sama sekali karena muncul peraturan pengelolaan hutan dari pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan terhenti tiba-tiba.

Faktanya, masyarakat belum memiliki teredukasi dengan baik tentang bagaimana mengelola hutan dengan bijaksana. Masyarakat masih berpegang pada keyakinan bahwa alam adalah sebuah wadah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal yang paling sering ditemui adalah perburuan liar, masyarakat memburu bukan sekedar untuk dikonsumsi tetapi hasil-hasil buruan diperjual belikan kepada pihak-pihak yang juga turut ingin mendapatkan keuntungan. Perburuan liar seperti ini akan mengancam habitat satwa-satwa didalam hutan, sehingga bukan kondisi fisik saja hutan yang rusak akibat ulah manusia, tetapi isi hutanpun terancam habis/punah.

Bukan hanya pemerintah yang berupaya mengedukasi masyarakat, upaya serupa juga banyak dilakukan oleh perusahaan swasta. Seperti perusahaan kelapa sawit PT Minamas Plantation di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, melakukan pencegahan kebakaran hutan yang berbasis desa mandiri melalui pelatihan dan pemberian wawasan kepada masyarakat lokal. Wakil Bupati Kalsel, Burhanudin mengatakan "Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan sebagai upaya menstimuli warga masyarakat desa agar mengerti bahaya api sehingga dapat mengadopsi pembukaan lahan dan mengelola limbah hasil pertanian tanpa membakar" (Wartaekonomi.co.id).

Edukasi adalah cara tepat untuk diterapkan secara berkelanjutan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Meskipun dalam memberikan edukasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Perjuangan mengedukasi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah, tidak terbatas pada penyuluhan semata, tetapi berbagai pendekatan media rakyat yang mereka miliki dapat kita manfaatkan untuk setidaknya menularkan pesan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar.

Menurut Soetrisno (1995) Pemerintah seharusnya memberi keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat setempat. Hal ini disebabkan belum berhasilnya pada perencanaan pembangunan sektor kehutanan untuk membuat suatu model pembangunan sektor kehutanan untuk membuat suatu model pembangunan sektor kehutanan yang mampu menciptakan *'match and link'* antara kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat lokal.

Kondisi hutan yang ada di Bontang saat ini buka hutan sesungguhnya yang berguna untuk keseimbangan alam dan ekosistem. Hutan justru digunakan untuk kegiatan komersial masyarakat yang punya kepentingan. Sehingga dilapangan banyak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh 2 nama yang berbeda. Sementara tanah yang ada dimiliki oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini yaitu kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yaitu eksplanatori

yaitu menggali lebih dalam terkait objek yang akan diteliti. Pendekatan studi kasus eksplanatori dipilih dengan pertimbangan bahwa studi kasus eksplanatori memiliki daya bongkar serta daya kejar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa". Dengan pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" diharapkan dapat menggambarkan yang utuh mengenai objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, rekaman arsip dan perangkat fisik. Berikut adalah metode pengumpulan data yang akan digunakan ;

- Wawancara mendalam (*Depth Interview*).
- Observasi.
- Focus Group Discussion.
- Dokumentas.

Penelitian ini akan dilakukan di kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang Kalimantan Timur. Subjek penelitian adalah pelaku program yakni orang-orang yang ada di dinas pertanian dan perikanan Kota Bontang dan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar hutan hujan tropis. Berikut Informan dalam penelitian ini :

- Roby Andi Lolo,SP, Kepala Seksi Kehutanan dan Perkebunan Kota Bontang.
- Endang, Staff Penyuluh Kehutanan Seksi Kehutanan dan Perkebunan.
- Saparuddin,SH, Mantan Direktur BIKAI.
- Kelompok tani hutan 'Bina Warga Lestari'.
- Kelompok tani hutan 'Karya Bersama'.
- Kelompok tani "Sabar menanti".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan, mengenai data yang telah didapat oleh peneliti terhadap informan. Adapun pembahasan mengenai edukasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam menjaga eksistensi hutan hujan tropis. Sebelum memulai melakukan pembahasan, terlebih dahulu peneliti akan menampilkan kelompok profil masyarakat kota Batu yang hendak diteliti.

Wawancara dengan Bapak Roby Andi Lolo, SP, Kepala Seksi Kehutanan dan Perkebunan Kota Bontang, tanggal 30 November 2016.

- **Kegiatan apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menjaga ekosistem hutan hujan tropis?**

“Terkait dengan rencana strategis (renstra) tahun 2001-2015 kami sudah melakukan reboisasi sekitar 150 hektar. Tetapi di kota Bontang tidak ada satu meter-pun kawasan hutan yang tidak dimiliki atau tidak ada alasan. Jadi selama ini memang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat dan itu memang polemik.”

“Kegiatan-kegiatan reboisasi yang kita lakukan selama ini bermitra dengan masyarakat melalui kelompok tani. Dengan membentuk kelompok, kami memberikan bibit, memberi upah pengangkutan bibit hingga dengan penanaman dan pemeliharaan”

- **Apa dasar masyarakat mengklaim lahan tersebut ?**

“Masyarakat bukan saja mengklaim lahan di Kota Bontang, bahkan TNK (Taman Nasional Kutai) juga diklaim. Masyarakat memiliki bukti legalitas sebelum penunjukan kawasan. Entah dulu pada saat itu ada dikasih surat penggarapan ada yang dibuatkan dulu aturannya dua tahun atau satu tahun tidak digarap maka itu secara otomatis kembali ke negara tetapi itu menyangkut pemerintah daerah masing-masing atau pemerintah setempat dalam hal ini desa pada saat itu”.

“Kita juga melaksanakan aturan itu tidak harus dengan sakral karena kita berhadapan dengan masyarakat. Maka cenderung kegiatan kami itu kita bentuk kelompoknya, kita legalitaskan dia untuk melaksanakan kegiatan dalam kawasan itu. Jadi kita bantu bibit, kita bantu biaya penanaman, kita bantu biaya pemeliharaan, nah dari situlah kita melakukan kegiatan pengawasan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu tadi baik yang ada di darat maupun yang ada di laut.”

- **Jenis bibit yang ditanam apa saja?**

“Sebelum kita melaksanakan kegiatan itu kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon kelompok tani hutan. agar bibit ini tidak mubazir atau ada manfaat bagi masyarakat sehingga kita mengupayakan semua ini. Masyarakat ingin bibit apa karena mpts dengan tanaman kehutanan kan dibolehkan dengan presentase 30% dan

70% tanaman buah yang kita bantu itu berupa durian okulasi, rambutan okulasi kecuali kalau tanaman kehutanan harus dari biji.”

“Dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan 2014 karena kehutanan sudah membolehkan jenis karet kita anggap penting karena karet ditanam tidak akan mungkin dia akan merusak populasi atau mau menebang pohon tapi disisi lain pohon yang bersangkutan kan bisa disadat getahnya bisa diambil, jadi berapa ratus ribu bibit karet itu dan kebetulan juga hutan lumayan pada waktu itu karet yang kita bantu adalah karet okulasi jadi bukan dari biji supaya cepat proses penghasilannya jadi getah karet dari segi tanaman itunya terus ada mpts yang dari okulasi”.

- **Apa Tujuan Bermita Dengan Masyarakat Melalui Kelompok Tani?**

“Tujuan kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak akan mengambil/merebut lahan begitu saja. Pemerintah hanya bertanggungjawab dari segi pengawasan. Opini di masyarakat yang berkembang ketika ada pemerintah masuk maka lahan-lahan tersebut akan diambil alih. Jadi kita mencoba memisahkan antara aturan dengan pemberdayaan masyarakat. Kawasan tidak boleh diganggu karena telah menjadi domainnya pemerintah.”

- **Bagaimana Posisi Hutan di Kota Bontang ?**

“Ini kan namanya hutan lindung

Bontang, itu namanya saja, tetapi secara administrasi berada di tiga kabupaten kota yaitu Kukar, Kutim dan Bontang kebetulan Bontang yang paling sedikit wilayah hutan lindungnya hanya lima ribuan hektar dan tahun kemarin kita melakukan pengusulan *enclave* yang sudah disetujui jadi yang di *enclave* itu sekitar seribu hektar lebih jadi hutan lindung Bontang yang ada sekarang itu tinggal 4000 lebih dan itu datanya sebelum *enclave* dan sesudah *enclave*...yang di *enclave* ini yang berpotensi untuk pengembangan kota saja karena Bontang tidak akan mungkin berkembang kalau tidak masuk arah hutan lindung kan kalau ke sana lagi kan laut, makanya Pemerintah Kota mengusulkan *enclave* kepada kementerian kehutanan, syukurlah diterima.”

- **Sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh seksi kehutanan untuk mengatur hutan?**

“Karena pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Kehutanan juga sadar bahwa tidak akan mungkin pengawasan itu sedetail itu maka disusun Permenhut. Permenhut yang memperbolehkan masyarakat melakukan aktivitas dalam kawasan, itu dengan adanya hutan kemasyarakatan dimana masyarakat mempunyai legalitas mengolah kawasan itu selama ia tidak mengubah bentang alamnya yaitu tadi dengan membuat kelompok, mengolah tanah dalam kawasan bisa dengan tanaman-tanaman keras tetap ditanam

tapi bisa ditumpangsarikan dengan tanaman-tanaman yang bersifat *temporary* kemudian menanam lagi maka secara otomatis kan sudah memelihara tanaman yang ada *gituloh*".

- **Selain memfasilitasi, Upaya apa saja yang telah dilakukan?**

"Kegiatan itu kan berasal dari renjasmen tahun 2001-2005 program kehutanan dalam kawasan itu terus dilakukan rehabilitasi, pola-pola kemitraan kepada masyarakat setempat yang merasa memiliki legalitas karena kita tidak berani melaksanakan kegiatan kalau tidak melibatkan yang menguasai lahan tersebut karena ini uang negara APBN yang riskan."

"Ketika kita sudah melaksanakan kita sudah *tenderkan* bibitnya tapi yang bersangkutan tidak bersedia, itulah makanya yang saya katakan tadi sosialisasi yang panjang, pemberitahuan pemahaman bahwa pemerintah tidak akan merampok atau mengambil lahan tersebut tetapi memberi malah justru sebaliknya pemerintah menyediakan bibit, pemerintah menyediakan upah tanam, pemerintah menyediakan biaya pemeliharaan hingga kegiatan itu dilaksanakan, kita tinggal mengawasi pelaksanaan."

"Nah terkait dengan regulasi 2015 dan 2016 kami sudah tidak melaksanakan fisik lagi karena draft undang-undang 23 tahun kemaren sudah muncul, jadi dimana kehutanan di daerah habis tidak ada, dikembalikan ke pusat

dan provinsi, *nomenklatur*nya hilang. Terkait dengan itu provinsi sudah menyiapkan sarana prasarana tentang yang bertanggungjawab dalam pengawasan hutan lindung tadi itu dengan pembentukan Kesatuan Pemangku Kawasan Hutan Lindung (KPKHL) di Santan, nah itu sudah dibentuk UPTnya oleh provinsi, jadi secara teknisnya nanti UPT itu yang akan melaksanakan.....UPTnya namanya Kesatuan Pemangku Kawasan Hutan Produksi tetapi didalamnya dia melaksanakan hutan lindung karena itu tadi dari hutan lindung Bontang ini hutan lindung itu paling kecil presentasinya dibandingkan dengan hutan produksi."

"Namanya hutan lindung tetapi kalo kita melihat kebanyakan alang-alang, kebanyakan ini karena memang dilematis, karena tidak bisa melakukan APBN kalau yang menguasai lahan tidak diketahui jadi yang jelas-jelas saja kita. Tetapi secara penyuluhan itu kita laksanakan."

- **Berapa lama edukasi itu dilakukan pak?**

"Itu kan *terschedule* oleh dinas jadi kita tidak bisa mengukur karena merupakan program dinas, melakukan penyuluhan dan pembinaan. Berdampingan ketika kegiatan mau masuk, makanya kita berdampingan. Tetapi kalau yang menyangkut penyuluhan itu rutin memang tupoksi dinas."

“Di Bontang ini yang menguasai hak atau mempunyai hak legalitas di atas kawasan itu ada yang di Balikpapan, ada yang di luar daerah dan seterusnya, terus kalau sekarang kita mau tinjau lokasi siapa yang mau kita temui. Itulah uniknya, beda kalau kawasan yang ada di Sulawesi, Jawa tidak akan ada orang melangkahhkan kaki ke dalam kawasan hutan lindung mereka karena di situ sudah terpola seperti itu.”

- **Apakah SDM Pemerintah sudah reresentatif dalam melakukan pengelolaan hutan?**

“Mereka sadar mereka memiliki kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak boleh...tetapi karena dulunya ada legalitas yang muncul di atas kawasan tersebut itulah yang menjadi pegangan bagi mereka, karena itu dulu dikeluarkan memang sah, sebelum penunjukan kawasan..disitulah peran pemerintah masuk melakukan penyuluhan.. tentang sadar akan lokasi yang diduduki di kawasan hutan makanya kita tekankan selama ini silahkan garap selama tidak merubah bentang alam, mereka juga sadar tidak boleh ada jual beli atau dipindah tangankan secara turun temurun ya silahkan digarap. Tapi jangan merubah bentang alam, jangan dibanguni macam-macam”

- **Berapa lama edukasi itu dilakukan pak?**

“Itu kan *terschedule* oleh dinas jadi kita tidak bisa mengukur karena merupakan program dinas, melakukan penyuluhan dan pembinaan.

Berdampingan ketika kegiatan mau masuk, makanya kita berdampingan. Tetapi kalau yang menyangkut penyuluhan itu rutin memang tupoksi dinas. Di Bontang ini yang menguasai hak atau mempunyai hak legalitas di atas kawasan itu ada yang di Balikpapan, ada yang di luar daerah dan seterusnya, terus kalau sekarang kita mau tinjau lokasi siapa yang mau kita temui. Itulah uniknya, beda kalau kawasan yang ada di Sulawesi, Jawa tidak akan ada orang melangkahhkan kaki ke dalam kawasan hutan lindung mereka karena di situ sudah terpola seperti itu.”

- **Apakah SDM Pemerintah sudah reresentatif dalam melakukan pengelolaan hutan?**

“Mereka sadar mereka memiliki kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak boleh...tetapi karena dulunya ada legalitas yang muncul di atas kawasan tersebut itulah yang menjadi pegangan bagi mereka, karena itu dulu dikeluarkan memang sah, sebelum penunjukan kawasan..disitulah peran pemerintah masuk melakukan penyuluhan.. tentang sadar akan lokasi yang diduduki di kawasan hutan makanya kita tekankan selama ini silahkan garap selama tidak merubah bentang alam, mereka juga sadar tidak boleh ada jual beli atau dipindah tangankan secara turun temurun ya silahkan digarap. Tapi jangan merubah bentang alam, jangan dibanguni macam-macam”

Wawancara dengan Ibu Endang Staff Penyuluh Kehutanan Seksi Kehutanan dan Perkebunan.

● **Bagaimana konsep penyuluhan yang dilakukan?**

“Penyuluhan tidak dilakukan secara berbondong-bondong seperti pada umumnya, saya sebagai penyuluh akan mengambil data perkebunan saat melakukan *monitoring* sambil jalan, ‘pak jangan melaksanakan pembakaran’, ‘pak nanti kalau bisa pada saat bapak menanam batas-batasnya nih dikasih tanaman, tanaman jenis kehutanan gitu, tanaman berkayu.”

“Jadi kalau kita berbicara penyuluhan itu tidak harus berbentuk forum. Ada saat kita sama ketua kelompok, saat kita mau monitoring ada anggota kelompok ada ketua kelompok, jadi sambil jalan itupun kita sambil interaktif kita juga terbentur dana, kita tidak bisa memberikan uang saku kepada mereka, kita tidak bisa memberikan uang makan kepada mereka”.

● **Apa Kendala terbesar saat penyuluhan?**

“Dana, kami hanya diberi tunjangan 400ribu perbulan dan itu dana yang sangat terbatas.”

● **Apa kendala saat harus bergerak mandiri saat penyuluhan?**

“Ya tidak bisa maksimal, cara mensiasati yakni secara interaktif dan tidak harus memberikan penyuluhan dalam bentuk forum melalui ketua RT

sehingga ketua RT dapat meneruskan informasi kepada warganya”.

● **Sejak kapan menjadi tenaga penyuluh kehutanan?**

“Saya bergerak dibidang penyuluhan sejak tahun 2010”.

Wawancara dengan Bapak Saparuddin,SH sebagai mantan direktur BIKAL.

● **Apa yang bisa bapak kritisi tentang penyuluhan yang telah berjalan selama ini?**

“Karena bicara edukasi, menurut saya awalnya jangan berbicara dampak seperti banjir dahulu karena masyarakat tidak akan peduli sejauh itu. Seharusnya diawal berbicara dari sisi ekonomi yang menguntungkan dan menarik perhatian mereka. Jika berbicara konservasi ke masyarakat saya yakin tidak akan didengar. Kami sekarang menggunakan konsep pemasaran sosial konservasi malah berubah menjadi terminologi kehutanan.”

“Jadi kita masuk ke edukasi anak-anak, kalau mau bilangan ke bapaknya jangan tebang pohon maka tidak akan efektif maka harus berbicara ke anaknya itu jauh lebih efektif. Kalau mau ngomongin ke mereka harus dengan sisi yang lain. Misalnya, ditaman nasional kutai. Agar mereka tidak menebang bakau lagi untuk kayu bakar, kami melakukan dua hal ; pertama, masyarakat mengambil kayu bakar untuk tiang rumah lalu kita kasih lihat ke mereka kalau bapak jaga ini dapat

kepinging banyak, ikan banyak dan bibit ini kita bisa dapat uang”.

“Di hutan lindung bontang itu berbeda, pertama memang dari tegakan pohon tidak ada. kalau persepsi masyarakat tentang hutan itu tegakan pohon, bukan status, kalau status, status hukum. Bicara tentang hutan lindung bontang di masyarakat pasti akan bilang lebih duluan masyarakat, karena dia bicara tentang penetapan hutan lindung bontang, mereka tidak terima.”

“Tapi dia lupa sebelum penetapan sebagai hutan lindung bontang itu. Sultan Kutai itu menetapkan lahan itu, sebagai kawasan suaka margasatwa. Jadi status sebenarnya kalau bicara lebih dulu mana hutan lindung bontang daripada masyarakat bisa jadi benar masyarakat. Tetapi sebelumnya status hukumnya bagaimana seperti suaka margasatwa yang sebelum jadi hutan lindung Bontang.”

- **Hutan di Jalan Flores apa masuk kawasan hutan lindung?**

“Masuk itu hutan lindung Bontang. Didalam revisi tata ruang karena dalam mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan itu bisa melalui revisi tata ruang provinsi Kaltim itu mengeluarkan beberapa ratus meter di kanan dan kiri”.

- **Artinya bukan domain pemerintah karena bukan termasuk kawasan hutan lindung?**

“Iya, itu sebelum pemerintah statusnya hutan lindung Bontang, 100

meter dikanan kiri jalan adalah areal pemanfaatan yang lain”.

- **Apa APL (Area Pemanfaatan Lain) bukan hutan lindung?**

“Bukan kalau sudah dikeluarkan statusnya, sudah dialih fungsikan karena disitu sudah ada tulisan fasilitas umum”.

- **Apakah itu melahirkan konflik?**

“Sebelum itu sudah menjadi konflik, tetapi justru masyarakat mereka itu dapat informasi sudah dikeluarkan dan mereka lambat semua, tetapi semuanya dirambah. Kini pemerintah juga tidak melakukan apa-apa”.

- **Apa Karena APL?**

“APL tidak semuanya. Kembali ke media komunikasi tadi, masyarakat dayak dapat surat dari raja Kutai sehingga mereka dapat hutan di Kaltim. Kalau bicara media komunikasi silahkan Anda cari tahu sendiri. Yang jelas masyarakat dayak menyebutnya dengan tanah Grand Sultan. Memang ada sejarahnya di Kutai Kertanegara tetapi saya tidak akan ceritakan disini.”

- **Advokasi yang dilakukan bikal menggunakan model apa saja?**

“Bikal bukan lembaga advokasi, kita pemberdayaan masyarakat. Kalau advokasi tuh WALHI, JATAM. Kalau advokasi dengan pemerintah cenderung berlawanan, kalau kami teman masyarakat dan pemerintah atau mitra, makanya teman-teman pada bilang kalau Bikal (Bina kelola lingkungan) itu LSM plat merah. Ya silahkan saja.”

- **Apa BIKAL (Bina Kelola Lingkungan) hanya ada di Bontang?**

“Bikal sebenarnya untuk KALTIM, cuman kemarin saya direktornya jadi saya bawa programnya ke Bontang, berau, kakaban, pemekaran merah dan Balikpapan terakhir rencana di Kutai. Kita tidak ada program khusus hutan lindung, Makanya saya bilang kalau mau banyak data, program,, belajar media komunikasi itu di TNK (Taman Nasional Kutai). Hutan lindung di Bontang datanya minim

- **Apa Saja pemberdayaan yang dilakukan saat kepemimpinan Bapak?**

“Konsep kehutanan disebut HKM (Hutan Kemasyarakatan) agar mereka dapat izin kelola dari negara, tetapi mereka tolak karena mereka bilang nanti kalau tanam pohon tanah mereka dikuasai negara. Meskipun dulu pernah diusul 600-800 hektar. Yang menolak mengklaim lahan tersebut.

- **Bagaimana pola kemitraan yang dilakukan pemerintah dengan Bikal?**

“Bentuknya kemitraan kerjasama, misalnya identifikasi masyarakat, membentuk kelompok agar dapat izin dari negara dan dikelola kelompok isinya 50 orang atau 25 orang, untuk proflnya kami buat begitu jga dengan peta.”

Wawancara dengan Masyarakat (Kelompok Tani)

Ibu Endang: “Ini ketua RT disini sekaligus ketua kelompok tani Bina Wana Lestari, pelaksana RHL tahun 2012 sampai 2013 Karena kita ini

keterbatasan dana untuk penyuluhan jadi kalau ada kegiatan sekalian, jadi kalau lagi melonggar ya melonggar sekalian. Dulu penyuluhannya sampai ke Jogja.”

- **Bagaimana cerita Bapak semenjak pertama kali ada disini dengan hutan yang dulu dan setelah ada RHL?**

Pak Taher Sayuti: “Oke terima kasih, assalamualaikum wr wb. Pertama saya tinggal disini tahun 1983 disini masih hutan dan penduduknya belum seberapa. Waktu itu pohon-pohon gede sudah gak ada tahun 1983, perusahaan-perusahaan kayu sudah masuk, perusahaan terakhir Kayu Mas kemudian masyarakat masuk melanjutkan sampai sekarang ini. Melanjutkan penebangan sampai sekarang. Sebelum 1983 itu sudah ada orang disini tapi gak seberapa termasuk.”

“Pak Daeng Sayuti itu orang pertama yang ada disini. Saya menetap disini mulai tahun 1997, dari tahun 1983 sampai 1992 saya sudah gak menetap disini terus tahun 1992 sampai 1997 saya menetap kerja proyek jalan.habis 1997 saya mulai menetap disini. Saya lihat perkembangan disini, ikutlah kelompok lainnya dan saya jadi sekertaris kelompok lain itu.tahun 1997 kondisinya sudah bukan hutan lagi, jadi belukar tapi dalam kawasan. Jadi pemahamannya dalam kawasan itu artinya dia bukan berbentuk hutan, tetapi dalam suatu kawasan hutan lindung.”

“Waktu itu ada kelompok lain, pendapat saya mungkin didengar tapi

tidak mau bertukar pendapat. Tahun 2000 saya sudah mulai kerja di tambang lagi. Tahun 2010 saya melihat perkembangan ekonomi, tahun 2010 itu saya sudah jadi RT coba-coba mengajukan permohonan ke dinas perkebunan kemudian saya buatlah kelompok pada tahun 2012”.

- **Apa yang dipikirkan sewaktu membangun kelompok?**

Pak Taher Sayuti: “Yang saya pikirkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat setempat. Kalau tidak ada kelompok bisa sebenarnya sejahtera tapi secara pelan-pelan masalahnya dana itu terbatas.”

Ibu Endang: “Kegiatan semacam hibah atau bantuan itu bisa dialirkan pada kelompok jadi kalau perorangan tidak bisa. Bantuan itu berupa bibit, kalau pertanian itu pupuk, sprayer, mulsa untuk tanaman supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan.”

- **Berapa anggotanya kelompok tani Bina Wana Lestari?**

Pak Taher Sayuti: “Kalau dulu banyak, sekarang sekitar 12 orang. Pernah sampai 30 lebih, masalahnya yang saya masukan dalam anggota waktu pembagian bibit sekitar 50 hektar tahun 2012. Tahun 2013 ada 2 kelompok, sekitar 50 hektar juga perkelompok jadi udah 100 hektar saya kelola.”

- **Paling banyak kepemilikan tanah berapa hektar per orang?**

Pak Taher Sayuti: “Ada 3 hektar lebih, bahkan yang paling banyak sampai 4 hektar. Masalahnya lahan ini dalam kawasan tapi sudah ada kepemilikan. Ini bedanya disana dan disini. Ini dalam kawasan juga, tetapi tidak ada tumpang tindihnya. Disini kelurahan **Tamansari**, disana **Kelurahan Satimpo.**”

Ibu Endang: “Makanya kenapa saya lebih sering melakukan penyuluhan disini ya karena itu. Saya pikir daripada saya cuman menyadarkan orang-orang yang menguasai lahan, lebih baik saya ke Tamansari sini, jadi mengajarkan mereka menanam, *‘ayo Pak ikut aja kegiatan ini nanti ada bantuannya’* lebih bermanfaat gitu artinya.”

“Daripada saya disana intinya konflik terus, saya pikir saya loh digaji cuman berapa mau loyalitas tanpa batas cape juga gak ada hasil. Kalau disini saya kan istilahnya ada kelompoknya Pak Andika, Pak Taher, bisa dibawa jalan-jalan.”

- **Berarti di Bontang Lestari ada berapa kelompok?**

Ibu Endang: “Khusus kelompok kehutanan aja ada 4 termasuk Pak Taher.”

- **Semuanya daerah sini semua?**

Ibu Endang: “Iya daerah sini semua, masyarakat sini semua. Sama ada lagi satu kelompok, cuman kelompoknya itu agak vakum makanya ga saya undang”.

- **Yang 3 kelompok lainnya?**

Ibu Endang: “3 itu, yang 1 masih miss komunikasi nanti ada menyusul satu kelompok. Kelompoknya Pak Andika sama Pak Tere itu.”

- **Berarti di kelurahan ini ada 4 kelompok?**

Ibu Endang: “Iya 4, sebenarnya ada 5. Yang terdaftar di dinas memang 4 karena 1 semenjak kegiatannya vakum dan saya tidak membina lagi disitu, tidak ada lagi sudah.”

- **Semuanya terdaftar di bagian apa kalau di dinas ibu?**

Ibu Endang: “Di dinas masuk binaan”.

Pak Taher Sayuti: “Kalau pemerintah sekarang baguslah, kembali ke masyarakat lagi kadang bantuan ada yang dirawat ada yang tidak, padahal ada bantuan karet dan buah segala macam, tetapi ya itu banyak yang tidak dirawat karena cenderung berfikir ke sawit.”

- **Bantuan yang diterima atas usulan masyarakat atau kelompok?**

Pak Taher Jaga: “Itu pertama dari saya, saya tawarkan ke warga yang mau. Walaupun tidak masuk kelompok saya tawarkan ke yang punya lahan. Sayang kan kalau tidak ditanami, tetapi ya itu tidak dirawat juga, makanya itu kembali ke faktor manusianya juga kesadaran mereka.”

Pak Taher Sayuti: “Itu tadi yang saya bilang, tidak bisa dipungkiri kita itu ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kita tidak juga

bisa memaksakan kelompok karena tidak menunjang peningkatan perekonomian”.

- **Kalau selain modal yang bantuan bibit, ada bantuan lain?**

Pak Taher Sayuti: “Ada herbisida, pupuk, cangkul, parang, ada semua”.

- **Apakah ada pemberian informasi bagaimana mengelola hutan?**

Pak Taher Sayuti: “Ada, tetapi saya tidak terlalu ingat”.

Ibu Endang: “Pada saat awal sebelum melakukan kegiatan itu kita ada CPCM, kita melakukan berapa kali pertemuan. Jadi kita kumpulkan dan mengajak mereka untuk menanam itu. Pemahaman bahasa kita sama bahasa mereka, kita harus bisa mngkonversi bahasa itu. Kita bilang kita melakukan penghijauan dan menanam itu supaya kita mendapatkan hasil, jadi gitu cara menjelaskan ke masyarakat. Apa yang mereka tangkap mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan, tetapi secara langsung mereka mendapatkan ilmu”.

“Jadi setiap sebelum kegiatan itu kita lakukan pertemuan menjelaskan kenapa mereka harus menanam karet, supaya hutan mereka tetap hijau dan mereka mendapatkan karetnya. Kemudian dijelaskan kenapa mereka harus menanam buah, supaya disela-sela mereka menanam itu mereka mendapatkan hasil buah. Kenapa ada tanaman kehutanan? Supaya kita bisa mempertahankan hutan. Persentasinya

itu karetnya 80%, tanaman kehutanan 10%, tanaman buah 10%”.

● **Apakah ilmu tentang menanam dilakukan dalam mengelola hutan?**

Pak TaHER Jaga: “Dilakukan tapi kalau anak sekarang sudah kurang tahu tradisi-tradisi. Tahun 80an sampai 90an masih ada tradisi-tradisi, kalau sekarang udah jarang.”

● **Bagaimana kondisi hutan pada awal-awal tahun 80an? Apakah sudah sejalan dengan program dari pemerintah?**

Pak TaHER Sayuti: “Pada tahun 80an, sebenarnya hutan disini sudah dikelola oleh satu perusahaan diambil kayunya oleh yang namanya Hutan Jaya milik orang cina dalam bentuk PT. Itu dulu di GST (kantor).tahun 80an itu kayunya ada berupa batang ada berupa balok. Tahun 1977 bapak saya masuk hutan ini sudah ada perusahaan yang mengelola, makanya bekasnya itu masih ada di jalan-jalan itu.”

● **Bagaimana perusahaan tersebut melakukan penebangan? Apakah sudah sesuai aturan pada tahun tersebut?**

Pak TaHER Jaga: “Kalau orang jaman dulu mereka belum mengerti bagaimana aturan itu. Saya melihat kalau jaman dulu seperti tidak punya aturan, karena dari yang besar sekitar diameternya 30 ke atas yang tersisa tinggal lobang-lobang saja,artinya tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka.”

● **Apa yang Bapak pikirkan saat dulu melihat hutan ditebang?**

Pak TaHER Sayuti: “Yang kita bayangkan sesuai dengan ilmu yang kita dapat kan waktu itu sudah SMP mempelajari tentang alam, kami membayangkan akan terjadi suatu bencana alam”.

● **Apakah ada cerita dari orang tua, bahwa kedepannya hutan yang ditebang akan seperti apa?**

Pak TaHER Sayuti: “Kalau orang tua berpikirnya akan ada suatu kampung disini, itu aja”.

● **Pada saat itu, adakah tindakan yang pemerintah lakukan?**

Ibu Endang: “Tidak ada,dulu posisi kesini itu tidak ada jalan. Dulu hanya lewat laut, masih masuk daerah Kutai”.

● **Bagaimana kondisi hutan dan peran pemerintah dari waktu ke waktu?**

Pak TaHER Sayuti: “Kalau pada jaman dulu kan belum ada istilah hutan lindung, kemudian orang tua saya mengambil keputusan agar daerah ini terhuni jadi tahun 80an tanah itu sudah dibagi per blok-blok untuk kelompok”.

“Kalau tidak salah tahun 1986 baru ada garis hutan lindung, tapi waktu ditanya ke petugasnya ini ada apa katanya tidak ada apa-apa. Mungkin dia takut dengan masyarakat hutan, dia bilang ini tidak ada apa-apa. Pada tahun itu alasan mereka ini akan dijadikan satu kampung, tahun 1985 itu kalau tidak salah”.

- **Bagaimana jika ada orang yang berpikir kalau hutan ini ditebang saja sehingga bisa jadi pemukiman ramai seperti Bontang, bagaimana menurut Bapak jika ada yang berpikiran seperti itu?**

Pak TaHER Sayuti: “Kalau kami melarang. Karena kesadaran manusia dalam merawatnya. contohnya bantuan karet kan, itu untuk penghijauan tetapi tidak ada yang merawat dan dibiarkan hingga ditumbuhi ilalang sehingga tidak ada yang dihasilkan dan begitu api datang habis itu”.

- **Bagaimana perhatian kelompok jika ada yang seperti itu? Padahal pemerintah telah melakukan sosialisasi?**

Pak TaHER Sayuti: “Kadang kita minta tolong untuk dirawat, iya-iya saja tetapi tidak dilaksanakan”.

Pak TaHER Jaga: “Kalau saya melihatnya mereka itu hanya ingin menguasai lahan. Mereka menunggu proyek-proyek tertentu. Kalau ada proyek-proyek gitu kan berarti ada izin dari pemerintah, berarti ada kerjasama antara pemerintah dengan proyek. Sebenarnya kita masyarakat itu tidak mau melihat hutan dikuasai oleh perusahaan karena hutan itu untuk masa depan anak cucu kita. Kalau tidak tersedia hutan, anak cucu kita nanti mau kemana”.

“Mudah-mudahan tidak ada proyek yang masuk kesini karena hutan ini untuk jangka panjang anak cucu kita.

Tapi mereka ini pendek pikirannya, bagaimana dompet saya terisi, dapur saya terisi, tidak memikirkan bagaimana mengambil hasil dari hutan itu. Padahal hutan itu memiliki potensial, tetapi sekarang mereka tidak memikirkan itu”.

- **Apakah ada pengetahuan menjaga hutan dari pemerintah?**

Pak TaHER Jaga: “Sebenarnya tanpa pengetahuan dari masyarakat hutan ini tetap bisa bertahan asal ada kesadaran dari masyarakat disekitar wilayah hutan. Bagaimana dan berapapun bantuan dari pemerintah, tanpa kesadaran masyarakat itu tidak bisa terjadi. Tinggal bagaimana manusianya aja lagi, kalau kita berbicara masalah hutan lindung pasti dia marah jadi membahasakan ke mereka itu jangan ada istilah hutan lindung”.

Ibu Endang: “Jadi mereka itu ada di dalam kawasan, mereka menguasai. Waktu kami sosialisasi mengajak mereka untuk menanam NHL itu berapa kali pertemuan sampai di dinas itu masih belum mau. Dikasih berapa lahan yang bapak sanggup menanam, itu masih gak mau. padahal kita mau mengajak mereka menghijaukan hutan itu. Bahasa kita itu ‘ayo bapak-bapak tanam karet supaya punya hasil’ masih gak mau mereka sampai kejar-kejaran sama limit tahun”.

- **Tapi kalau kelompok mau saja?**

Pak TaHER Sayuti: “Kalau pengurusnya sih mau. Masalahnya Pak, daerah ini waktu dulu bapak saya

bagikan kan bukan orang sini tapi dari Santan. Nah mayoritasnya kan bukan dari sini. Jadi begitu kita ajak menanam hutan itu jawabnya *bisa aja' 'bisa aja itu'* tapi perawatannya nanti tidak diperhatikan nah itu yang susah kita artikan itu".

- **Apakah mungkin karena mereka tidak suka dikasih karet?bagaimana jika dikasih sawit?**

Pak Taher Jaga: "Tidak sih, program itu kan berjalan karena mereka juga setuju. Tetapi melihat prospek pernah karet itu anjlok, mereka membayangkan itu. Karena itu merek berpikir bahwa sawit lebih menguntungkan dan membiarkan karet ini. Padahal dia tidak memikirkan bagaimana masa depan yang akan datang, bagaimana kalau hutan kita ini habis".

- **Apakah ada pemberitahuan tentang bagaimana karet dan sawit dari dinas?**

Ibu Endang: "Kelebihan dan kekurangan itu sudah berkali-kali dijelaskan dengan sering. Bahkan teman-teman ini sudah diajak keluar untuk meilhat begini loh cara pemanfaatan hutan itu. Kita ada ke Jogja itu di Gunung Kidul. Kita bisa melihat bagaimana mereka disana itu gak ada air, itu aja mereka bisa memanfaatkan tanah tandus".

Pak Taher Sayuti: "Waktu awal satu tahun karet itu berjalan mereka

mau saja,tetapi waktu harga karet anjlok itu mereka mudah terpengaruh".

- **Pengaruhnya apa?**

Pak Muamar: "Dari kelapa sawit ini, prospek kedepannya. Mereka melihat karet harganya melemah. Apalagi kalau karet kan harus tiap hari sedangkan sawit tidak usah dijaga pekerjanya tidak apa-apa karena tidak harus setiap hari, 1 bulan 2 kali panen sedangkan kalau karet harus dikumpulkan dulu. Kalau sudah diangkut orang karet satu karung habis kita, kalau kelapa sawit lebih susah dicuri orang, jadi pengaruhnya dari situ".

Pak Andika: "Nama saya Andika, ketua kelompok Karya Bersama Lestari. Jadi kami termasuk binaan dari dinas kelompok kehutanan dapat bantuan karet 25 hektar, jenis tanamannya 80%, 10% mahoni, dan 10% buah".

- **Yang menentukan persentase dari siapa?**

Pak Andika: "Dari kami itu atas usulan kami, jadi teman-teman kami sepakat kita kasih acuan ke dinas dengan persentase tersebut".

- **Kenapa memilih mahoni?**

Pak Andika: "Alasannya ya karena itu titipan dari dinas sebagai tanaman kehutanan, jenisnya kita yang minta pada tahun 2014."

Ibu Endang: "Jadi gini, 2012 itu tanaman kehutanannya gaharu, tanaman MPTS itu buahnya rambutan. Pelaksanannya itu tahun 2012 yang

dijaga Pak Taher. Tahun 2012 tersisa 20% aja lagi.”

Pak Muamar: “Punya saya itu 3 hektar terbakar mau diapain. Mau panggil pemadam kebakaran itu dia bilang jauh betul jawabannya padahal lahan di belakang rumah saya itu yang terbakar.”

- **Itu yang minta atas nama masyarakat atau kelompok?**

Pak Taher Sayuti: “Dari masyarakat lewat telepon, banyak alasannya terakhir itu disuruh beli air tandon. Sampai saya jam 3 malam terbangun itu memadamkan api”.

- **Didalam kelompok itu sering terjadi perdebatan?**

Pak Andika: “Perdebatannya itu status seperti apa kedepannya ini kan tanaman pemerintah. Jadi bagi hasilnya seperti apa. Apakah pemerintah 70% kita 30% atau seperti apa pembagiannya”.

Ibu Endang: “Sudah dijelaskan juga bahwa tanaman ini untuk bapak dan ibu nikmati”.

Pak Muamar: “Tapi begitu sudah antara anggota saling bertemu pasti ada provokasinya itu salah satu berpikiran negatif.”

- **Kalau dalam obrolan antar kelompok gitu ada tidak membahas bahwa hutan kita ini penting sekali?**

Pak Muamar: “Tidak ada. Terus terang tidak ada seperti itu”.

Pak Andika: “Mikirnya apa yang mau ditanam di lahan ini supaya ada hasil”.

- **Berarti kalau ada perusahaan yang mau membeli apakah masyarakat akan menjual?**

Pak Muamar: “Kalau harganya cocok bisa saja mereka jual”.

- **Walaupun itu nanti digunakan untuk aktivitas pertambangan?**

Pak Taher Sayuti: “Ya itu karena mereka hidup ke kawasan tetapi tidak perduli. Sempat saya mengajak dan memberikan mereka motivasi untuk bekerja karena tanaman karetinya juga masih ada tetapi tetap tidak mempan”.

- **Apakah ada program yang ditawarkan pemerintah namun tidak disepakati oleh masyarakat atau sebaliknya?**

Pak Taher Jaga: “Ini seperti model kelapa sawit, masyarakat mau tapi pemerintah tidak mau, pernah saya tawarkan cenderung ke kelapa sawit itu”.

- **Apa pendapat masyarakat ketika pemerintah tidak menyetujui?**

Pak Taher Sayuti: “Ya diam saja kalau memang pemerintah tidak bisa bantu. Tapi ya mudahan kedepannya ada bantuan dari pemerintah”.

Ibu Endang: “Jadi kemarin itu pemahamannya seperti ini, karena teman-teman itu melihat harga kelapa sawit dengan perbandingannya di Santan yang eksis sekali kemudian seperti yang tadi dijelaskan bahwa masyarakat menginginkan untuk itu lalu pemerintah kan juga punya pertimbangan. Di Bontang ini kita tidak punya danau, ada

danau 1 tapi mungkin kalau hujan habis ya disana itu, kita tidak punya waduk seperti Balikpapan untuk mengelola air kita di Bontang”.

“Penjelasan kita kemarin seperti itu, kenapa kita tidak mengizinkan ada kelapa sawit di Bontang karena itu tadi kita tahu sawit itu tanaman yang cukup rakus. Kawasan yang masuk air seperti di tempat Pak Suroso itu bisa kering tandus itu mengapa kita tidak mengizinkan. Jadi sawit-sawit yang bapak lihat tadi itu benar-benar swadaya mereka dan tidak ada sedikitpun bantuan”.

“Karena memang Bontang itu hanya menggantungkan air itu di tanah jadi kami membayangkan kalau kami merekomendasikan sawit, mau menggantung dimana air itu. Itu penjelasan kemarin itu kenapa pemerintah tidak mem-*follow up* keinginan masyarakat. Itu sudah sering disampaikan”.

Pak Andika: “Dari pengelolaan sekian hektar ini pola pemeliharaannya tidak berlanjut. Jadi kita mengusulkan dari 100 hektar ini bagaimana kalau digunakan 50 hektar kemudian dananya diaturkan. Karena untuk mengelola kawasan seluas ini dananya harus diperhitungkan dari segi pupuk, terus masyarakat disini kerjanya petani jadi waktu fokus ke satu lahan ini, penyambung hidup sehari-hari kemana? Karena yang diperoleh berapa persen tetapi yang jadi hanya sekian persen.

Kalau kita mengerucutkan dari 100 hektar menjadi 50 hektar kemudian diolah selama 5 tahun maka itu akan jadi”.

Ibu Endang: “Ada lagi dulu yang tidak disetujui *alcon* (mesin rumput). Jadi dulu harapannya *alcon* itu bisa mengantisipasi kemarau, jadi tetap bisa menyiram tanaman, tetapi kendalanya tidak ada dana untuk dialokasikan ke pemeliharaan tadi”.

Pak Andika: “Bahkan saya pernah mengusulkan juga bagaimana jika lahan itu di swastakan saja artinya nanti pemerintah dan swasta mengurus lahan 100 hektar itu berapa nilai lelangnya dan masyarakat dipekerjakan di lahan lelang tersebut”.

- **Kalau misalnya pohon yang ditanam itu 60% mahoni, kira-kira bapak setuju tidak?**

Pak Taher Sayuti: “Waktu kecil itu orang-orang menyebutkan tanaman kehutanan nilainya tinggi tetapi dulu disini belum ada garu, jadi motivasi masyarakat disini kan pingin kaya paling tidak pingin sejahtera dari sisi kegiatannya tetapi disini tidak ada. Saya dari kecil tidak ada bahkan satupun tidak ada disini”.

- **Yang punya garu berapa?**

Ibu Endang: “Waktu itu ada yang punya garu, itu disuntik ternyata tidak maksimal hasilnya. Jadi mereka itu orientasinya lebih ke ekonomi, saya sedikit menambahkan untuk pembagian 40%-10%-10% itu memang ada dari

Kementerian untuk melaksanakan RAL harus melaksanakan 80%-10%-10%. Ya itu tadi tanaman karet itu tanaman bergetah, masyarakat bisa menanam karet tanpa menebang, kemudian kenapa MPTS nya 10 karena dia hanya sebagai tanaman penyeling supaya teman-teman kelompok itu bisa menikmati buah dan menjual, kemudian kenapa harus tanaman kehutanan itu kemarin kita mencoba untuk membuat batas-batas tanah”.

“Jadi mereka sebelum menanam itu kami lakukan sosialisasi kelompok mana yang siap untuk menjalankan, jadi semua ada tahapannya. Kemudian untuk jenis buah mereka kami tawarkan maunya apa tapi kalau persentase itu kita memang yang persyaratkan”.

- **Disini mata pencahariannya apa saja pak? Memang hanya petani atau ada lagi?**

Pak TaHER Jaga: “Petani itu sampingan, termasuk saya pekerjaannya di PDAM”.

Pak TaHER Sayuti: “Jadi di Bontang ini kan banyak proyek, jadi mereka habis kerja itu ada pilihan tambahan. Jadi diamna-mana daerah itu banyak proyek, pertaniannya itu hanya sampingan. Bedanya sama di Jawa mereka hanya bertani karena tidak ada pilihan lain”.

Pak TaHER Jaga: “Karena memang tidak menjanjikan kalau pertanian disini, memang kalau dilihat harga sekian seperti harga cabe atau

tomat kan penduduk Bontang ini tidak seberapa, sebetulnya persatuan petani juga bagus begitu harga cabe dipasar naik, rame-rame tanam cabe semua. Kemudian pertanian disini tidak pakai hitung-hitungan, kalau pakai hitung-hitungan sekian-sekian, tidak ada yang mau bertani”.

“Saya sering membina kelompok kan, kemarin dari kelompoknya Pak Anas puluhan juta habis tidak ada kembali karena pakai perhitungan hanya untuk memajukan mereka saja.nanti ada lumbungnya tetapi tidak tahu bagaimana cara mengisinya tapi nanti ada pelatihannya dan katanya ada asuransinya”.

Ibu Endang: “Itu bukan dari kami, dari Ketahanan Pangan tapi nanti tahun depan itu bergabung lagi ke dinas kami”.

Pak Andika: “Kami pernah mendengar katanya akan ada asuransinya. Jadi acuannya kita ambil padi 8 ton yang tercapai hanya 5 ton nanti 2 ton akan dibayarkan”.

Pak TaHER Sayuti: “Tetapi ya itu petani harus ada manajemennya, kalau petani disini tidak ada manajemennya, tidak akan diganti itu karena mereka bertanya salah-salah”.

Ibu Endang: “Jadi kelompok tani yang ada disini tidak monoton kelompok tani hutan, mereka juga punya peternakan, mereka juga punya sawah, mereka juga punya hortik, mereka juga punya sawit, sehingga jadinya gagal

fokus. Saya juga bingung kalau mengajak menanam karet, sebulan dua bulan lebih tinggi alang-alangnya.”

● **Kelompok tani ini sudah berangkat kemana saja?**

Ibu Endang: “Tahun ini ada pekan raya di Penajam kami tidak punya anggaran memang, jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu karena memang Peda atau Pekan Daerah semua bidang pertanian, hortik, sawah ditunjukkan disana teknologi dan investor jadi kalau memang teman-teman ada yang swadaya kesana benar-benar dia antusias ingin mendapatkan ilmu disana”.

“Karena memang disitu ajangnya mau ketemu petani, nelayan, pengusaha disitu ajangnya. Jadi mereka itu yang dibiayai terakhir itu yang Penas sudah termasuk uang saku, transport, mereka sudah taunya bersih. Waktu itu dibawa ke Malang. Kalau ke Jogja sama Bali itu studi banding. Di Bali liat hutan mangrove kalau di Jogja liat saung tani dimana dengan lahan beberapa hektar itu ada ikannya, tanaman lomboknya, ada ternaknya luar biasa itu. Tapi itu tadi menyadarkan orang ternyata susah juga”.

“Karena kita masih banyak pilihan, kita masih produktif, jadi posisinya kalau mereka masih bisa di tambang lalu untuk menjaga hutan itu memang agak berat, tetapi untuk usahanya masih ada. Yang pasti kita kalau dari pemerintah tidak pernah

kurang-kurang memberikan penyuluhan dan bantuan, dulu pernah ada juga bantuan jahe. Tujuannya untuk memanfaatkan tanaman toga yang ada di kawasan itu tapi tidak juga ada hasilnya. Dikasih 2 kwintal paling jadinya 50 kg”.

Pak Taher Jaga: “Saya melihat kalau masyarakat disini misalnya gagal bertani mereka berpikinya gapapa, itu kan bantuan tidak ada juga modal yang keluar”.

● **Tapi bantuan itu tetap berlanjut?**

Pak Taher Jaga: “Tetap sih, tapi saya berpikiran sebenarnya mereka itu tidak mau dibantu biarkan mereka mandiri.coba lihat sawit itu mereka beli bibitnya sendiri, dijaga dengan baik kan. Coba Bu Endang kasih bantuan sawit 2-3 hektar kan, paling itu tidak dirawat karena kalau gagal kan mereka tidak rugi”.

Pak Andika: “Jadi kami mendapat bantuan dari dinas 9000 pohon tapi yang tertanam tidak sampai 50%”.

Ibu Endang: “Padahal tujuan pemerintah itu membantu untuk awalnya memberikan stimulan kepada masyarakat, pancingan awal itu kami beri bibit kami beri alat supaya mereka itu tinggal memelihara aja, tapi persepsinya mereka justru beda karena itu bantuan yau dah ga usah dipelihara aja”.

Pak Taher Jaga: “Itu aja alat tani di kelompok saya pakai itu kalau anggota gunakan yaudah biarkan aja rusak, jadi saya sebagai pengurus karena

tidak ada dana yang diambil dari mereka untuk operasional terpaksa berkorban karena kan kita malu kalau alat itu tidak bergerak, masa dibantu bisa tapi tidak diperbaiki, itu anggapan mereka. Pada waktu kesepakatan diawal oke saja ada iuran ditanya diawal ada yang keberatan katanya tidak ada, tetapi begitu dipungut tidak ada yang iuran”.

Pak Andika: “Itulah kenapa kalau kita kelompok ini harus berjiwa sosial tinggi, saya sering ketika masih bekerja ditanya kenapa merangkap saya bilang untuk persiapan pensiun”.

Ibu Endang: “Jadi saya polanya sekarang ini saya tanya dulu mau nanam apa, misalnya jeruk atau kates oke saya support itu, misalnya mau mengajukan ke provinsi kita dampingi, seperti itu. Jadi pola penyuluhan dan pola pendampingan itu kita ubah, kita tidak boleh memaksa mereka. Tadi coba lihat kan, dikasih bibit, dikasih peralatan, dikasih insentif penanaman, gak main-main loh insentifnya itu cukup besar”.

“Jadi gitu sekarang cara mengelola hutan itu mengikuti apa maunya mereka yang ada dalam kawasan kita coba dampingi aja, karena kalau kita mau mencoba program pemerintah yang masuk, tidak diterima merekapun maka tidak akan dijaga. Jadi kalau sistem proyek itu kan pada saat pekerjaan sudah dinyatakan 100% maka dibayar, katakanlah setelah satu tahun kemudian sudah ya habis itu wassalam.

Memang pola masyarakatnya disini seperti itu tidak bisa dipaksa”.

- **Ada tidak masyarakat yang tidak masuk ke dalam kelompok tetapi dia peduli terhadap hutan? Misalnya dia ingin masuk kelompok tetapi tidak punya lahan,ada tidak kasus seperti itu?**

Ibu Endang: “Masih ada tapi tidak seberapa, karena ada yang terbakar juga lahannya”.

Pak Taher Sayuti: “Kemarin sudah saya ajak, bahkan saya alihkan lokasinya tetapi karena ada pikiran negatif timbul dan ada yang provokatori”.

Ibu Endang: “Ada juga seperti Pak Nasution, dia punya dana pemeliharaan untuk anak buah. Ada sih masyarakat yang masih sadar, tetapi kecil sekali”.

- **Kelompok ini berkembang sejak kapan?**

Ibu Endang: “Kalau ini baru-baru saja sejak ada saya, tapi Pak Taher ini sudah ada sejak dulu dia pertanian”.

Pak Taher Sayuti: “Hutan rakyat itu sudah ada sejak tahun 2004”.

- **Pada saat terbentuknya kelompok tani, apa yang dikerjakan?**

Pak Taher Sayuti: “Tahun 90an itu sudah pertanian 3 generasi, kemudian 2004 hutan rakyat, lalu vakum.:

- **Tahun 2004 itu program hutan rakyat dari pemerintah ada apa saja?**

Pak Taher Sayuti: “Itu tanaman hutan, jenis tanamannya gamalina jati putih, jati, dan buah-buahan rambutan, kayumanis, kemiri, sama sukun. Itu tidak di kawasan hutan lindung, hak milik kalau di lingkungan hutan rakyat sebagian mereka sudah panen”.

- **Berapa hektar itu lahannya?**

Pak Taher Sayuti: “50 hektar”.

- **Kalau Pak Taher tadi kelompoknya tahun berapa?**

Pak Taher Sayuti: “2012”.

- **Itu pertanian dulu atau bagaimana?**

Pak Taher Sayuti: “Langsung kehutanan, sama seperti Pak Andika. Kalau Pak Andika tahun 2011, tapi awal pertaniannya itu dulu kopi tapi belum eksis betul”.

- **Yang ditanam apa saja?**

Pak Taher Sayuti: “Karet juga Edukasi dari Pemerintah. Pemerintah Kalimantan Timur memiliki terancam rusaknya ekosistem hutan hujan tropis salah satunya di kota Bontang. Kelurahan Bontang lestari merupakan satu diantara sekian banyak lokasi yang memiliki banyak masalah-masalah dengan masyarakat dalam menjaga eksistensi hutan hujan tropis. Mulai dari pembakaran hutan untuk dijadikan lahan baru, klaim lokasi-lokasi secara adat oleh masyarakat dan masalah lainya masih sering terjadi. Pengelolaan hutan dari pemerintah akhirnya berjalan tidak optimal”.

Banjir, kebakaran hutan pada musim kemarau dan bencana alam lainnya adalah dampak dari kerusakan hutan. Jika hutan terjaga, memiliki pohon-pohon yang rimbun sehingga hutan dapat menjalankan fungsinya menyerap air ketika hujan datang dan menyimpannya di celah-celah akar kemudian melepaskan perlahan ke daerah aliran sungai. Hutan berfungsi mengontrol debit air sehingga pada musim hujan tidak meluap dan menyebabkan banjir. Dalam hal ini hutan berfungsi sebagai pengatur hidrologis bagi kehidupan manusia.

Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan dikarenakan kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah dengan penggundulan dan alih fungsi lahan hutan yang dikenal dengan sebutan deforestasi. CIFOR (*International Forestry Research*) menyebutkan tutupan hutan yaitu dikarenakan perladangan berpindah-pindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri perkayuan. Menurut World Bank laju deforestasi antara 700.00 sampai 1,200.000 hektar.

Untuk menghadapi masyarakat yang tinggal disekitar hutan hujan tropis pemerintah telah berupaya melakukan penyuluhan, sosialisasi agar masyarakat sekitar tidak berpasangka buruk terhadap lembaga pemerintahan. Masyarakat banyak memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharianya seperti:

- a. Sebagai pemburu dan peramu
(*hunting and gathering*)

- b. Peternak, penanam tanaman di ladang secara berpindah-pindah, penangkap ikan
- c. Penanaman tanaman secara menetap dengan memanfaatkan pupuk kimia, pestisida dan irigasi.

Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan seringkali meruakan kelompok yang paling miskin di Indonesia. Dari 25,9 juta orang yang dikategorikan miskin, 34% hidup disekitar hutan. Tahun 2008 sekitar 40% penduduk pedesaan di Indonesia bergantung pada hutan untuk mata pencahariannya.

Dari sinilah timbul konflik ketika pemerintah melakukan pengembangan hutan seringkali berlawanan dengan hukum adat kepemilikan yang diyakini masyarakat sekitar. Tidak ada batasan yang jelas tentang jarak hutan dan banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan serta masih banyak lagi konflik didalamnya.

Edukasi adalah cara yang digunakan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perilaku dalam menjaga hutan. Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata dengan cara memberikan dorongan terhadap pengarah diri (*self direction*), aktif memberi informasi-informasi atau ide-ide baru (Craven dan Hirnle, 1996 dalam Sulih, 2002).

KESIMPULAN

Edukasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat disekitar hutan hujan tropis di kelurahan lestari kota Bontang berupa pemahaman, pendidikan secara berkesinambungan kepada masyarakat. Pemerintah berupaya mengajak masyarakat untuk turut menjaga keberadaan hutan. Caranya bukan dengan mengeksplorasi habis-habisan hutan tersebut, apalagi hampir sebagian besar masyarakat sekitar menggantungkan kebutuhan hidup mereka kepada alam (hutan) melalui pemburuan, membuka lading untuk bercocok tanam dan aktivitas lainya yang berpotensi besar merusak hutan.

Beragam edukasi terus menerus dilakukan oleh pemerintah kota Bontang, meskipun diawal masyarakat sekan menutup mata. Persepsi buruk masyarakat yang menganggap ketika pemerintah datang ke mereka, Fenomena dilapangan yang terlihat yakni masyarakat seharusnya juga ikut merasakan dari keuntungan pengelolaan hutan dari pemerintah, bukan sekedar merasakan dampak negatif akibat ulah mereka sendiri. Keuntungan yang dirasakan nantinya dapat memberikan pemahaman secara tidak langsung bagi masyarakat tentang perlunya menjaga eksistensi hutan hujan tropis.

Selain itu, pemerintah dalam menjaga ekosistem alam, juga melakukan upaya kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan fasilitas kepada kelompok. Pemberian fasiltas tersebut adalah program terencana dari dinas terkait.

Saran

- a. Pemerintah lebih banyak membuat kegiatan bukan sekedar mengedukasi, tetapi memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan yang menguntungkan mereka sehingga masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- b. Penyuluhan yang dilakukan lebih baik menggunakan beragam pendekatan tradisional kemasyarakat. Sehingga persepsi masyarakat tidak melihat ketika pemerintah datang seolah-olah mencuri lahan mereka
- c. Menjadwalkan secara rutin penyuluhan dan pelatihan dalam membina masyarakat dalam hal edukasi/memberikan pemahaman tentang eksistensi hutan hujan tropis.

Warta Ekonomi diakses pada 1 Desember 2016 pukul 15:04 WITA
<http://wartaekonomi.co.id/read/2016/11/04/119018/cegah-kebakaran-hutan-perusahaan-sawit-kasih-edukasi-ke-masyarakat-lokal.html>

Firmansyah, H , Yulianti. M , Alif, M, Strategi Komunikasi Dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pada Pengelolaan Lahan Gambut Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Di Sektor Pertanian Kalimantan Selatan, MetaCommunication; Journal Of Communication Studies, Vol 02 no 1, 2017.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/3005>

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Indriyanto. 2006. Ekologi Hutan. Bumi Aksara. Jakarta.

Soetrisno Loekma. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Kanisius. Yogyakarta

Suliha. 2002. Pendidikan Kesehatan dalam keperawatan. EGC. Jakarta

SKRIPSI

Sutra, Niko (2003). Sikap Masyarakat Terhadap Perlindungan Hutan (Studi Kasus di Kenagarian Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok). Skripsi FPIPS IKIP Padang.

INTERNET

Repository.usu.ac.id diakses pada 1 Desember 2016 pukul 13:04 WITA